**PRINSIP GOOD FINANCIAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH (CLEAN GOVERNANCE)

**Nonon Nuraeni Rani**

**138040022**

**Hukum Ekonomi**

**ABSTRAK**

Reformasi pengelolaan keuangan negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam bidang penyusunan anggaran perubahan yang dilakukan meliputi penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (*performance based budgetting*), penerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), dan penerapan anggaran terpadu (*unified budget*). Adapun permasalah hukum dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi hukum keuangan daerah di Indonesia terhadap pengelolaan keuangan daerahguna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih?; Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih?; Apakah yang menjadi hambatan dan upaya melaksanakan prinsip *good financial* dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih (clean governance) ?

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Hasil penilitian menunjukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terpenting dimana undang-undang pemerintahan daerah menyatakan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hambatan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas.

Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Daerah.

*ABSTRACT*

*State financial management reform covers all aspects of state finance management, namely budgeting, budget execution, and accountability of budget execution. In the field of budget preparation the changes include the implementation of performance-based budgeting system, budgeting implementation within the medium term expenditure framework, and implementation of integrated budget. The legal problem in this research is How to develop local financial law in Indonesia to the local government financial management to realize clean local government ?; What is the position and authority of the Regional Head in managing regional finances to realize a clean local government ?; What are the obstacles and efforts to apply good financial principles in the management of regional finances in order to realize clean governance?*

*The research specification in the preparation of this thesis is done by analytical descriptive method which describes the existing problem and then examine and analyze it by using primary law material, secondary law material and tertiary legal material. The method used in this study is the normative juridical approach, namely test and secondary data review. In relation to the normative juridical approach used, the study was conducted through two stages: literature study and field research that only support, data analysis used was qualitative juridical analysis, ie data obtained, systematically arranged, comprehensive and integrated to achieve clarity. issues to be discussed.*

*The results show that the authority of Regional Government in managing regional finance as the most important part where the Regional Government Law states to implement regional autonomy of financial authority inherent in each government authority becomes the authority of Territory. The Regional Head is the holder of the power to regulate the management, accountability and supervision of regional finances based on legislation. The obstacles that exist in the management of local finance is the limitation of Human Resources, both in quantity and quantity or in terms of quality or competence ability owned is very important the successful implementation of the main tasks and functions. Another obstacle is the lack of coordination between agencies and agencies / agencies.*

*Keywords: Management, Finance, Region*